

Judul : Keanggotaan Indonesia di BoP disorot setelah AS Serang Iran
Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Keanggotaan Indonesia Di BoP Disorot Setelah AS Serang Iran

Di tengah kesucian bulan Ramadan yang seharusnya dijunjung tinggi dengan nilai-nilai perdamaian, dunia kembali menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang memilukan. Aliansi Amerika Serikat dan Israel secara brutal dan kejam menyerang Iran secara tidak berperikemanusiaan. Tindakan serangan ini melanggar hukum internasional dan melukai perasaan umat Islam sedunia. Serangan ini tidak hanya menghancurkan dan merenggut nyawa rakyat, tetapi bahkan mengakibatkan gugur dan syahnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Imam Ali

Khamenei. Dengan peristiwa tersebut, berbagai pihak mendesak agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP). Desakan datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Prabowo mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari BoP. Desakan juga datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kompak meminta agar Indonesia mengevaluasi status keanggotaan dalam wadah yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump. Setali tiga uang, Peneliti Institute of International Studies

(IIS) Universitas Gadjah Mada mendesak pemerintah keluar dari BoP. Desakan ini muncul setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Desakan yang sama diungkapkan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani. Menurut dia, bergabungnya Indonesia di BoP tidak menguntungkan bagi perdamaian dunia. Justru keberadaan Indonesia secara langsung melegitimasi keinginan Trump. Tak hanya itu, BoP juga hadir hanya untuk mengcover kepentingan Israel dan Amerika.

Buktinya, BoP mandul ketika melihat serangan Amerika ke Iran. "Karena itu, lebih baik Indonesia keluar dari BoP," desaknya. Menanggapi hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusran Wahid mengatakan, Pemerintah mendengarkan soal desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). "Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian,"

ujar Nusran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam. Lalu, bagaimana respons DPR dalam menanggapi desakan tersebut? Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mendukung Indonesia tetap berada di BoP. Dia beralasan peran Indonesia akan semakin kuat jika berada di BoP. "Keputusan untuk tetap berada dalam BoP sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional," kata dia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pandangan Ahmad Yani dan Dave Laksono atas desakan agar Indonesia keluar dari BoP, berikut petikan wawancaranya.

AHMAD YANI, Eks Anggota Komisi III DPR

Aliansi BoP Mandul Dan Tidak Berguna



“ Kami meminta Presiden Prabowo segera menarik diri dari keanggotaan BoP.

Saat ini beberapa lembaga atau orang-orang meminta agar Indonesia keluar dari BoP. Apa pandangan Anda? Kami menilai bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) sebagai inisiatif Presiden Prabowo akan tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemerdekaan Palestina. Aliansi BoP justru mandul dan tidak berguna.

Berarti Anda juga setuju jika Indonesia keluar dari BoP? Kami meminta Presiden Prabowo segera menarik diri dari keanggotaan BoP.

Kira-kira apa alasannya? Karena faktanya lembaga ini tidak memiliki taring di hadapan agresi AS-Israel.

Peran Indonesia juga kurang maksimal, ya? Bertahan di dalamnya hanya akan

mengjadikan posisi Indonesia tidak efektif, mengingat hak veto dan kredibilitas kebijakan tetap berada di bawah dominasi Donald Trump. Dan sebagai inisiatif BoP, ia memiliki konflik kepentingan yang nyata demi ambisi supremasinya.

Apakah Indonesia tidak berperan? Keberadaan Indonesia di dalam BoP justru berisiko memperkuat legitimasi politik Trump untuk mengambil keputusan sepihak yang merugikan kepentingan Dunia Islam.

Lalu, apa harapan Anda ke depan terutama dalam situasi perang saat ini? Kami meminta Presiden Prabowo untuk kembali pada mandat konstitusi, menghapuskan penjajahan di atas dunia dan tidak membiarkan kebijakan luar negeri Indonesia terseret menjadi *underdog* atau kepangjangan

terhadap kepentingan AS-Israel. Inisiatif apapun untuk membantu kemerdekaan Palestina harus dilakukan melalui mandat PBB, sebagai badan resmi yang memiliki legitimasi.

Terlihat perang, bagaimana? Kami meminta Presiden untuk menolak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan hukuman dan tekanan kepada Amerika Serikat dan Israel atas tindakannya melakukan serangan brutal dan kejam yang tidak berperikemanusiaan yang menyerang Iran. Tindakan ini melanggar hukum internasional.

Kami mengajak seluruh Ormas Islam dan elemen kekuatan umat Islam di Indonesia dan Dunia, untuk bersatu padu melawan segala bentuk imperialisme baru. Umat Islam harus berdiri secara politik, ekonomi dan militer agar tidak terus menjadi objek permainan kekuasaan global. ■ **SEN**

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Di BoP Indonesia Bisa Jadi Juru Damai



“ Keputusan untuk tetap berada dalam BoP sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional.

Apa respons dan pandangan Anda dengan adanya desakan agar Indonesia keluar dari BoP?

Saya memandang bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi kita. Setiap pandangan yang muncul patut dihargai sebagai wujud kepedulian terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam menjaga konsistensi dengan amanat konstitusi.

Konstitusi kita dengan tegas menempatkan cita-cita perdamaian dunia sebagai predomanan utama. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap langkah politik luar negeri, termasuk ketika Indonesia berpartisipasi dalam forum internasional seperti BoP.

Banyak yang memandang keberadaan Indonesia di BoP tidak baik untuk Indonesia? Keanggotaan Indonesia di BoP bu-

kan sekadar urusan teknis, melainkan sarana strategis untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga ketertarikan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Anda, Indonesia tidak perlu keluar dari BoP?

Dengan tetap berada di BoP, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat peran sebagai juru damai. Forum ini memberi ruang bagi kita untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang, mendorong dialog, dan memastikan bahwa prinsip keadilan serta perdamaian tetap menjadi prioritas dalam sistem global.

Indonesia sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi dan mediasi internasional. Kita pernah berperan dalam proses perdamaian

di Kamboja, Mindanao, hingga Afghanistan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia di forum global bukan hanya simbolis, melainkan kontribusi nyata dalam menciptakan solusi damai.

Berarti Indonesia harus tetap di BoP?

Keputusan untuk tetap berada dalam BoP sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Komisi I DPR RI menegaskan bahwa Indonesia dapat terus menjaga kredibilitas di mata dunia, memperkuat diplomasi, serta memastikan kepentingan rakyat tetap terlindungi.

Aspirasi masyarakat tentu menjadi bahan pertimbangan, namun arah kebijakan luar negeri harus senantiasa berpijak pada prinsip dasar negara kita, yaitu keadilan, perdamaian, dan keadilan. ■ **SEN**